**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN**

**DAN HIPOTESIS**

**2.1. Kajian Pustaka**

**2.1.1. Pembangunan Manusia**

Menurut *UNDP* (*United Nation Development Program*) yang dimaksud dengan pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihanbagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjaditujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakansarana (*principal means*) untuk tujuan tersebut. Definisi ini lebih luas dari definisipembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalamkonsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis sertadipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.

Dari definisi yang diberikan oleh UNDP tersebut mencerminkan bahwa manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dan dibutuhkan dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Paradigma tersebut memunculkan pilihan-pilihan yang lebih luas bagi masyarakat seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial serta kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dan produktif sesuai dengan hak-hak manusia yang menjadi bagian dari paradigma tersebut.

Dalam pembangunan manusia terdapat hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian utama (UNDP, 1995:118), yaitu :

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal
4. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu : produktifitas, pemerataan, kesinamabungan, dan pemberdayaan
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu diperhatikan lebih lanjut empat pilar pokok yang mendukung pembangunan manusia, dijabarkan lebih lanjut UNDP (1995), empat pilar pokok yang mendukung pembangunan manusia tersebut adalah:

1. Produktivitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia
2. Ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini
3. Kesinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi
4. Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pembangunan manusia pada hakikatnya adalah memperluas pilihan bagi masyarakat dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan tiap-tiap anggota masyarakat sehingga pembanguan manusia dalam hal ini juga mencakup berbagai aspek lainnya yaitu selain aspek ekonomi terdapat pula aspek sosial, politik, budaya serta aspek lainnya untuk menjadikan manusia lebih produktif dalam berkegiatan. Dengan demikian paradigma pembangunan manusia mencakup dua sisi yaitu berupa informasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik.

Aspek pembangunan manusia ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia ini merupakan salah satu alternatif pengukuran pembangunan selain menggunakan *Gross Domestic Bruto*. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak.

Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju.

* + - 1. **Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut *UNDP*, Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, harapan lama sekolah, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. *HDI* digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan *HDI* tahunannya. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan dan indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angaka harapan hidup ketika lahir dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*), pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas; dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar anatara 0-100.

**Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia**

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu :

1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
2. Tingkat pendidikan diukur dengan harapan lama sekolah (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

**Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia**

Dimensi Umur Panjang Kehidupan

dan Sehat Pengetahuan yang layak

Indikator Angka harapan Angka melek Rata-rata Pengeluaran

Hidup pada saat lahir huruf (Lit) Lama sekolah (Capita riil

(MYS) yang disesu

Aikan (PPP

rupiah

Indeks Lit Indeks MYS

Indeks Indeks harapan hidup Indeks pendidikan Indeks pendapatan

Dimensi

Indeks Pembangunan Manusia

Sumber : Buku Indeks Pembangunan Manusia (2010 : 20) BPS

**Tabel 2.1**

**Perubahan Metodologi Indeks Pembangunan Manusia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimensi | Metode lama | | Metode baru | |
| UNDP | BPS | UNDP | BPS |
| Kesehatan | Angka harapan hidup saat lahir (AHH) | Angka harapan hidup saat lahir (AHH) | Angka harapan hidup saat lahir (AHH) | Angka harapan hidup saat lahir (AHH) |
| Pengetahuan | Angka melek huruf (AMH) | Angka melek huruf (AMH) | Harapan lama sekolah (HLS) | Harapan lama sekolah (HLS) |
| Kombinasi angka partisipasi kasar | Rata-rata lama sekolah (RLS) | Rata-rata lama sekolah (RLS) | Rata-rata lama sekolah (RLS) |
| Standar Hidup Layak | PDB per Kapita (PPP US$) | Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp) | PNB per Kapita (PPP US$) | Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp) |
| Agregasi | Rata-rata Aritmatik | | Rata-rata Geometrik | |

Sumber: BPS

**Klasifikasi Pembangunan Manusia**

Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat berdasarkan tabel 2.2 yang menunjukkan pengelompokkan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:

**Tabel 2.2**

**Klasifikasi Capaian IPMCapP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Capaian IPM** | **Klasifikasi** |
| IPM < 60 | IPM rendah |
| 60 ≤ IPM < 70 | IPM sedang |
| 70 ≤ IPM < 80 | IPM tinggi |
| IPM ≥ 80 | IPM sangat tinggi |

Sumber: BPS

**2.1.2. Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran Pemerintah (*goverment expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.

Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang pemerintah lakukan, yaitu jika pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. (Mangkoesoebroto, 1994)

Menurut Suparmoko (1994:78) dalam Desi (2010:47) bahwa pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.
2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Sedangkan macam-macam pengeluaran pemerintah, yaitu :

1. Pengeluaran yang self liquiditing sebagian atau sepenuhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa dan barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek-proyek produktif.
2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomi bagi masyarakat yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pertanian, pendidikan, dan pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.
3. Pengeluaran yang tidak termasuk self liquiditing dan reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambahkan kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, pendirian monument dan sebagainya.
4. Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan utang pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya adalah pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, yang dibedakan atas pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek.

Menurut Permendagri No.52 Th 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Th 2016. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

1. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga
3. Belanja Subsidi
4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
5. Belanja Bagi Hasil Pajak
6. Belanja Bantuan Keuangan
7. Belanja Tidak Terduga
8. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan
2. Belanja Pegawai
3. Belanja Barang dan Jasa
4. Belanja Modal
5. Surplus/Defisit APBD

**2.1.3. Investasi**

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output, tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi (Sukirno, 2005).

Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA) dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN), yang kemudian dilengkapi dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri. Berdasarkan dari sumber kepemilikan modal, maka investasi swasta dapat di bagi menjadi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Investasi atau pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan mengganti dan untuk menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa di masa depan. Investasi atau pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dibedakan menjadi investasi perusahaan swasta, perubahan inventaris perusahaan, dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Penggunaan modal baik PMDN maupun PMA digunakan bagi usaha- usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Investasi tersebut dilakukan secara langsung. Yakni melalui pembelian-pembelian obligasi, surat-surat kertas perbendaharaan negara, emisi-emisi lainnya (saham-saham) yang dikeluarkan oleh perusahaan serta deposito-deposito dan tabungan yang berjangka panjang sekurang-kurangnya satu tahun. Harrod dan Dommar memberikan peranan kunci kepada investasi terhadap peranannya dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan, dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (Jhingan, 2004: 229).

* + - 1. **Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Didalam neraca nasional atau struktur Produk Domestik Bruto (PDB) menurut penggunaannya investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal tetap domestik (domestik fixed capital formation). Investasi sebagai salah satu komponen penting dari permintaan agregat di dalam ekonomi meruakan faktor yang sangat krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi dalam negeri (sustainable development). Salah satu indikator keberhasilannya adalah tingkat pendapatan nasional per kapita atau laju pertumbuhan produk domestik (PDB) rata-rata per tahun yang tinggi dan stabil. Proses pembangunan ekonomi dalam negeri melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor ekonomi domestik untuk keperluan kegiatan- kegiatan tersebut, perlu dibangun pabrik-pabrik, gedung perkantoran, mesin dan alat-alat produksi. Selain itu perlu disiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang terampil, untuk pengadaan semua itu, termasuk fasilitas seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan sebagainya untuk mendukung penyiapan smber daya manusia, diperlukan dana yang disebut dana investasi (Tambunan, 2000).

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 pasal 1 Tahun 1968 pengertian penanaman modal dalam negeri adalah bagian daripada kekayaan masyarakat Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di indonesia, yang disisihkan guna menjalankan sesuatu usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Penanaman modal dalam negeri merupakan bagian dari penggunaan kekayaan yang dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik sendiri atau secara tidak langsung, antara lain melalui pembelian obligasi, saham, deposito, dan tabungan yang jangka waktu minimal 1 tahun. Menurut undang-undang tersebut pada pasal 3, perusahaan yang dapat menggunakan modal dalam negeri dapat dibedakan dua jenis perusahaan, yaitu perusahaan nasional dan perusahaan asing. Dimana perusahaan nasional dapat dimiliki seluruhnya oleh negara dan atau swasta nasional ataupun sebagai usaha gabungan antara negara dan atau swasta nasional dengan swasta asing dimana sekurang-kurangnya 51% modal dimiliki oleh Negara atau swasta nasional. Dalam setiap izin usaha yang diberikan kepada perusahaan asing yang menggunakan modal dalam negeri ditentukan jangka waktu berlakunya yang sudah diatur oleh pemerintah dan undang-undang.

Sedangkan batas waktu dalam berusaha bagi perusahaan asing, baik perusahaan baru maupun perusahaan lama dibatasi antara 10 tahun dan 30 tahun. Jika jangka waktu usaha bagi perusahaan asing telah berakhir, maka warga Negara asing yang bersangkutan dapat melanjutkan usahanya dengan mengalihkan modalnya ke bidang usaha lain yang batas waktu usahanya belum berakhir dan mengadakan usaha gabungan dengan perusahaan nasional. Setelah waktu berusaha untuk perusahaan asing berakhir, maka perusahaan atau modal yang dimiliki oleh warga Negara asing yang bersangkutan harus dialihkan kepada warga Negara Indonesia. Jika perusahaan asing telah diberi peringatan secara tertulis sekurang-kurangnya dua kali oleh instansi pemerintah yang berwenang, warga Negara asing yang tersebut dalam waktu satu tahun sejak berakhirnya jangka waktu usahanya, maka pemerintah atau instansi terkait berhak melakukan likuiditas terhadap perusahaan asing tersebut.

Pemerintah berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan dan menyelenggarakan usaha-usaha, agar pada waktunya perrusahaan- perusahaan nasional dapat menampung dan melakukan fungsi serta kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan asing yang batas waktunya telah berakhir.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain adalah untuk :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Menciptakan lapangan kerja.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
   * + 1. **Penanaman Modal Asing (PMA)**

PMA atau investasi asing merupakan invetasi yang dilakukan oleh para pemilik modal asing di dalam negeri untuk mendapatkan suatu keuntungan dari usaha yang dilakukan. Menurut Jhingan, pemasukan modal asing sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Modal asing membantu dalam industrialisasi, dalam membangun modal overhead ekonomi dan dalam mencipatakan kesempatan kerja yang lebih luas. Modal asing tidak hanya membawa uang dan mesin tetapi jiga keterambilan teknik. Ia membuka daerah- daerah terpencil dan mengarap sumber-sumber baru yang belum dimanfaatkan. Resiko dan kerugian pada tahap perintisan juga ditanggung modal asing. Selanjutnya, modal asing mendorong pengusaha setempat untuk bekerja sama dengan perusahaan asing. Ia meniadakan problem neraca pembayaran dan menurunkan tekanan inflasi. Modal asing membnatu memodernisasi masyarakat dan memperkuat sektor Negara maupun sektor swasta. Penggunaan modal asing dengan demikian penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi Negara-negara terbelakang.

Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Nomor 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal dan kredit luar negeri:

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
2. Alat-Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia.
3. Bagian dari hasil perusahaan yang didasarkan dalam Undang- Undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Pengertian PMA diatas adalah penggunaan dari modal asing untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Peranan PMA dalam pembangunan adalah :

1. Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahan struktur produksi dan perdagangan.
3. Modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana.

Untuk PMA dari segi ekonomi dianjurkan berada dalam keadaan sebagai berikut :

1. Pemilik modal asing mau menginvestasikan modalnya pada proyek- proyek besar.
2. Pemerintah dalam menerima kredit PMA harus benar-benar menggunakan kredit untuk proyek-proyek yang bisa membangun tabungan dan capital lebih lanjut.

**2.1.4. Kemiskinan**

Menurut Bappenas yang dimaksud kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Sedangkan menurut PBB kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain.

Menurut *World Bank* (2004) dalam Whisnu Adhi Saputra (2011), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of* *income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima *(acceptable*). Selain itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor)* tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi. (Bappenas).

* + - 1. **Indikator Kemiskinan**

Masalah kemiskinan bisa ditinjau dari lima sudut, yaitu persentase penduduk miskin, pendidikan (khususnya angka buta huruf), kesehatan (antara lain angka kematian bayi dan anak balita kurang gizi), ketenagakerjaan, dan ekonomi (konsumsi/kapita). Indikator-indikator utama kemiskinan menurut BPS, antara lain sebagai berikut :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun kelompok.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketergantungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil).

Sedangkan menurut UNDP indikator kemiskinan harus diukur dalam satuan hilangnya tiga hal utama (*three key deprivation*) antara lain sebagai berikut:

1. Kehidupan (lebih dari 30 persen di negara-negara kurang berkembang tidak mungkin hidup lebih dari umur 40 tahun),
2. Pendidikan dasar (seperti diukur oleh presentase penduduk dewasa yang buta huruf, dengan penekanan pada hilangnya hak pendidikan perempuan),
3. Keseluruhan ketetapan ekonomi (diukur oleh presentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan air bersih ditambah presentase anak-anak dibawah usia 5 tahun yang kekurangan berat badan)

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse dalam Jundi (2014) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian,dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

1. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

1. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

* + - 1. **Garis Kemiskinan**

Garis kemiskinan merupakan sebuah ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Di Indonesia, garis kemiskinan yang biasanya dipakai untuk mencerminkan tingkat penduduk miskin adalah garis kemiskinan yang diterapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditas di pedesaan. Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional (BPS).

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditunjukan dengan pertumbuhan ekonomi saja tetapi lebih kepada pembangunan manusia dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator dalam mengukur kualitas dari hasil pembangunan ekonomi yaitu derajat perkembangan manusia.

Dilihat dari dampaknya, investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik itu investasi publik ataupun swasta, karena investasi akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Masyarakat yang sebelumnya menjadi pengangguran akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, daya beli masyarakat yang merupakan bagian dari komponen IPM juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan adanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat akan mengakibatkan jumlah peningkatan IPM lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan pendapatan dalam masyarakat (Sumanto, 2012).

Sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi menurut (Harrod-Domar dalam Royan, 2015) untuk dapat meningkatkan laju perekonomian, diperlukan investasi sebagai tambahan stok modal. Jika ingin tumbuh dengan pesat, maka perekonomian haruslah menginvestasikan sejumlah proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak investasi, maka semakin cepat pula perekonomian akan tumbuh. Hasil analisis yang diuji oleh Royan (2015) menunjukkan bahwa, investasi berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM. Besarnya nilai IPM mencerminkan besarnya kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli ekonomi keluarga. Dorongan dari pemerintah untuk memperbesar nilai investasi sangat dibutuhkan, dengan tidak meninggalkan peran swasta, agar dapat mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable economic*).

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier, dalam Kahang, 2016). Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia diuji oleh Tri, maryani (2012) mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Untuk meningkatkan pembangunan manusia yang berkualitas selain memiliki tingkat pendidikan setinggi mungkin tentu harus ditunjang dengan kesehatan baik sehat jasmani dan rohani, maka pemerintah dalam hal ini sangat perlu memerhatikan bidang kesehatan dengan meningkatkan pelayanan publik, dan alokasi anggaran yang diharapkan menunjang bidang kesehatan. Pengeluaran pemerintah pada sektor anggaran kesehatan yang di keluarkan untuk memenuhi salah satu hak dasar untuk memperoleh pelayanan kesehatan berupa fasilitas dan pelayanan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat (Todaro dan Smith, 2003).

Menurut Tjiptoherijanto, dalam Astri (2013) melihat mutu manusia dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Arifin (2015) mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Selain itu, kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta dapat menikmati lingkungan yang sehat. Dari sudut pandang ekonomi faktor-faktor tersebut akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah. Menurut UNDP (1996) dalam Patta (2012) hubungan antara tingkat kemiskinan dan pembangunan manusia, yaitu banyaknya penduduk miskin turut mempengaruhi pembangunan manusia. Karena penduduk yang masuk kelompok ini, pada umumnya memiliki keterbatasan pada faktor produksi, sehingga akses terhadap kegiatan ekonomi mengalami hambatan. Akibatnya produktivitas menjadi rendah, pada gilirannya pendapatan yang diterima pun jauh dari cukup. Dampaknya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan mengalami kesulitan. Apalagi untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya menjadi terhambat. Implikasinya pada wilayah-wilayah yang terdapat cukup banyak penduduk miskin, akan mengalami kesulitan untuk mencapai keberhasilan pada pembangunan manusianya.

Jika penduduk miskin memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau dengan kata lain terjadi pengurangan tingkat kemiskinan, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan bagian pengeluaran rumah tangga yang dibelanjakan untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga pengurangan kemiskinan dapat kita lihat dari jumlah penduduk miskin tersebut, atau dengan kata lain dengan berkurangnya penduduk miskin maka pembangunan manusia akan mengalami peningkatan (Ranis, 2004). Kasanah (2016) menghasilkan penelitian berdasarkan hasil estimasi data panel menunjukkan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Dengan demikian, kerangka pemikiran yang mendasari penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

* 1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diduga investasi berpengaruh positif terhadap IPM Provinsi Jawa Barat
2. Diduga pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM Provinsi Jawa Barat
3. Diduga pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM Provinsi Jawa Barat
4. Diduga tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM Provinsi Jawa Barat
5. Diduga investasi, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, dan tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap IPM Provinsi Jawa Barat secara simultan.